

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POLA  
KEMITRAAN INTI PLASMA**  
( Studi Pada Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian, Kec.  
Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah )

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun oleh :

**ARDIYANTO**  
**115030507111002**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**  
**MALANG**  
**2017**

## **Motto**

*Sekecil Apapun Usaha  
Yang Anda Punya, Anda  
Adalah Bosnya*

*“ Bob Sadino ”*

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POLA  
KEMITRAAN INTI PLASMA (Studi Pada Perkebunan Kelapa Sawit  
Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin  
Barat. Prov, Kalimantan Tengah)

Disusun oleh : Ardiyanto

NIM : 115030507111002

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Minat : Administrasi Pemerintahan

Malang, 18 September 2017

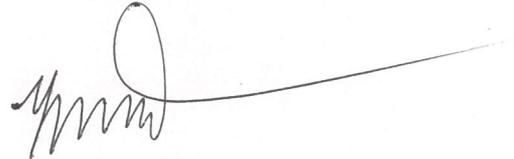
### Komisi Pembimbing

Ketua



**Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota



**Drs. Minto Hadi, M.Si**  
NIP. 19540127 198103 1 003

## TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

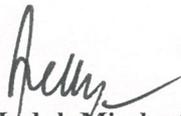
Hari : Kamis  
Tanggal : 08 maret 2018  
Jam : 10.00 – 11.00 WIB  
Skripsi atas nama : Ardiyanto  
Judul : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
POLA KEMITRAAN INTI PLASMA ( Studi Pada  
Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian, Kec.  
Kotawaringin Lama. Kab, Kotawaringin Barat. Prov.  
Kalimantan Tengah )

**Dan dinyatakan LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



**Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
NIP. 19690524 200212 2 002



**Drs. Minto Hadi, M.Si**  
NIP. 19540127 198103 1 003

Penguji



**Dr. Mardiyono, M. PA**  
NIP. 19520523 197903 1 001

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan pada daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 22 September 2017



Ardiyanto

NIM. 115030507111002

## RINGKASAN

**Ardiyanto, 2017, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma (Study Pada Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah), Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si dan Drs. Minto Hadi, M.Si.**

Pola kemitraan inti plasma atau di sebut juga perkebunan inti rakyat (PIR) pada desa riam durian juga dilakukan untuk mempersiapkan oragansiasi petani (kelompok tani, koperasi, koperasi primer maupun sekunder), dalam melakukan pengelolaan kemitraan inti plasma atau pekebunan inti rakyat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma (study pada perkebunan kelapa sawit Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama kab. Kota waringin barat prov. Kalimantan tengah)? dan 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma, (study pada perkebunan kelapa sawit Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama kab. Kota waringin barat prov. Kalimantan tengah)?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yaitu: 1) Pemberdayaan masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian dan 2) Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan meningkatkan 1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit dapat ditunjukkan dari bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit dapat ditunjukkan adanya pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dan upaya ini dilakukan untuk memberikan dukungan terkait dengan upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis dapat diketahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma, perkebunan kelapa sawit, dimana kurangnya hubungan dengan masyarakat luar menyebabkan setiaparganya sulit untuk melakukan kontak atau hubungan dengan masyarakat lain.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 1) meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan 2) upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dan kelompok peduli dalam implementasi program pemberdayaan dan 3) untuk lebih meningkatkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat maka diperlukan adanya transparansi anggaran (dana) dalam pengelolaan program pemberdayaan.

***Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat dan Pola Kemitraan Inti Plasma***

## SUMMARY

Ardiyanto, 2017, Community Empowerment Through Plasma Core Partnership Pattern (Study on Oil Palm Plantation of Riam Durian Village, Kotawaringin Lama Sub-district, Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province), Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si dan Drs. Minto Hadi, M.Si

The pattern of nucleus core partnership (PIR) in the cultivation village of durian is also done to prepare farmers' organizations (farmer groups, cooperatives, primary and secondary cooperatives), in managing the core partnership of plasma or people's core planters. The formulation of the problem in this research is 1) How is the empowerment of society through the pattern of plasma core partnership (study on oil palm plantation of Riam Durian Village, Kotawaringin Lama district, west waringgin town of Central Kalimantan province)? and 2) What are the factors that influence community empowerment through the core plasma partnership pattern (study on oil palm plantations in Riam Durian village, Kotawaringin Lama district, western waringgin town of Central Kalimantan)?

This research uses descriptive research type with qualitative approach. The focus of this research are: 1) Community Empowerment Through Plasma Core Partnership Pattern, Oil Palm Plantation of Riam Durian Village and 2) Factors influencing community empowerment through Pattern of Plasma Core Partnership, Oil Palm Plantation of Riam Durian Village.

Based on the results of research and discussion that has been done, it can be drawn conclusion that is as follows: 1) Implementation of community empowerment through the pattern of plasma palm oil plantation partnership can be shown from the form of community empowerment Duram Riam Village Through Plasma Core Partnership Pattern, Oil Palm Plantation can be shown the existence of natural resource management with the arrangement of the function of the area as a place of rural settlement, government service, social service, and economic activity and this effort is done to provide support related to effort to do community empowerment. The results of the analysis can be seen as the supporting factors and obstacles in the implementation of community empowerment through the pattern of core partnership plasma, oil palm plantation, where the lack of relationships with the outside community causes every citizen is difficult to make contact or relationships with other communities.

Suggestions proposed in this research are 1) to increase the participation of the community to participate in empowerment activities conducted 2) community empowerment efforts can also be done by increasing the involvement of private parties and care groups in the implementation of empowerment program and 3) to further improve the success of community empowerment then it is necessary to have budget transparency (fund) in managing empowerment program.

Keywords: Community Empowerment and Core Plasma Partnership Pattern

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan oleh penulis. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POLA KEMITRAAN INTI PLASMA (Study Pada Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah)

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materil dalam mengkaji dan menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Ike Arni Noventi, S.AP., M.AP, selaku Sekretaris Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku ketua komisi dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dalam membimbing, selalu memberikan semangat dan motivasi, serta meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku anggota komisi dosen pembimbing skripsi yang juga sangat berperan dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Mardiyono, M. PA selaku dosen penguji yang memberikan arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Karyawan dan Staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah turut serta memberikan dukungan dan kemudahan selama proses perkuliahan.
9. Seluruh koperasi KMB yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan kesediaan untuk memberikan penjelasan dan data-data dalam proses penelitian.
10. Ucapan Terima Kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku, Bapak Hobat. L dan Ibu Sahmaon yang Tercinta telah memberikan semangat, motivasi dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis.
11. Kepada Kakak-Kakak Saya, Hobby, Lidya Feronika Astuti, Sumiyati, Dan Srihartuti yang telah memberikan semangat, motivasi dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis.
12. Kepada teman spesial Ranti, yang telah memberikan semangat, motivasi dukungan serta doa kepada penulis.
13. Sahabat-Sahabatku Yoyon Sartono, haryono, Melky Sedek Gijoh, Andri Bilbob, Andri Defi, Riki, Icuk Sugiarto, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
14. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Administrasi Pemerintahan angkatan 2011 yang telah menemani dalam suka dan duka sejak pertama kali penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi.
15. Kepada Teman-Teman, Keluarga Besar Peumahan Gajayana In Side Jln. Joyosuko Merjosari (Malang), yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
16. Terimakasih juga kepada keluarga Bapak Bambang Pujiono yang selalu memberikan dukungan dan motifasi kepada penulis dalam jangka waktu penulisan penelitan ini.

17. Kepada keluarga besar saya yang ada di desa riam durian dan tempayung. bapak sahrian, bapak bapak samsuri, ibu sohaini, sah nanik, bapak hajat, bapak gati, bapak juntin, ibu ate, ibu sunarti dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
18. Seluruh pihak yang berperan dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan karya ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan keilmuan dan bagi kemajuan Indonesia.

Malang, September 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>A. Administrasi Publik</b> .....	13
1. Pengertian Administrasi Publik .....	13
2. Sejarah Perkembangan Administrasi .....	15
<b>B. Administrasi Pembangunan</b> .....	17
1. Pengertian Pembangunan .....	17
2. Paradigma Pembangunan .....	19
<b>C. Pemberdayaan Masyarakat</b> .....	20
1. Konsep Pemberdayaan .....	20
2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	24
3. Proses Pemberdayaan.....	25
4. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat .....	27
5. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan.....	28
6. Strategi dan Upaya Pemberdayaan.....	31
<b>D. Kemitraan</b> .....	33
1. Pola Kemitraan.....	33
2. Jenis atau Pola Kemitraan .....	34
3. Tujuan Kemitraan .....	35
<b>E. Pola Inti Plasma</b> .....	38
1. Definisi Inti Plasma.....	38
2. Maksud Dan Tujuan Inti Plasma.....	39
3. Indikator Kinerja Inti Plasma.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	45
D. Sumber Data Penelitian .....	45

E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian .....	47
G. Keabsahan Data .....	48
H. Analisis Data.....	49

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>52</b>
1. Gambaran Umum Kalimantan Tengah.....	52
2. Iklim .....	53
3. Topografi .....	53
4. Penduduk .....	54
5. Sosial, EkonomidanBudaya.....	54
6. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ...	55
<b>B. Penyajian Data Fokus Penelitian .....</b>	<b>60</b>
1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desarium Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit (Study Pada Desarium Durian Kecamatankotawaringinlama) 60	
a. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian	
b. Aktivitaspemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma Desarium Durian .....	62
c. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.....	64
d. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian	65
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Pada Desarium Durian Kec, Kotawaringin Lama) .....	70
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>80</b>
1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian melalui pola kemitraan inti plasma, perkebunan kelapa sawit (Studi Pada Desa Riam Durian Kec, Kotawaringin Lama)....	80
a. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.....	80
b. Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma DesaRiam Durian .....	82
c. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian .....	84

d. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian	85
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa riam durian melalui pola kemitraan inti plasma, perkebunan kelapa sawit (Studi Pada Desa Riam Durian Kec, Kotawaringin Lama)	87

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

## DAFTAR PUSTKA

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Mekanisme Pola Kemitraan Inti Plasma .....	5
2	Analisis data .....	50
3	Peta Kalimantan Tengah .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Bentuknya pun bermacam-macam, seperti perwujudan potensi-potensi yang dimiliki maupun pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan swadaya dan prakarsa masyarakat setempat. Hikmat (2010: 04) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Selama ini pemberdayaan kurang berjalan baik karena banyaknya program yang ditawarkan tidak diiringi dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Jadi dalam suatu proses pemberdayaan harus bisa memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan. Hal ini akan terwujud apabila ada sinergitas yang baik antara pemerintah selaku pelaksana program dengan masyarakat yang bertindak sebagai penerima program.

Dan Dalam perkembangannya, pembangunan bangsa-bangsa di dunia mengalami beberapa pergeseran pola, model atau paradigma pembangunan mulai dari paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*), paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*), paradigma neo-ekonomi, paradigma dependensia, paradigma pembangunan manusia (*people centered development paradigm*), hingga pendekatan yang memfokuskan pada pembangunan sumber

daya manusia (*human resource based development approach*). Tjokrowinoto (1996: 8) berpendapat:

“pendekatan yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia mempunyai arti bahwa tujuan utama dari pembangunan dan kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan dan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu: kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya”.

Hal tersebut tidak terlepas dari persoalan kompleks negara-negara berkembang saat ini yang sedang menghadapi ketidakadilan, keterbelakangan dan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat mendasar untuk ditangani, terlebih pada wilayah perkotaan. Hal ini diketahui dari penduduk yang tidak memiliki sarana dan prasarana dasar, lingkungan yang kurang memadai, kualitas perumahan jauh di bawah standar, mata pencaharian yang tidak menentu serta tingkat penghasilan yang relatif rendah

Kemiskinan menurut Nasir dkk, (dalam Ningsih, 2012: 1) dapat dibedakan menjadi tiga pengertian yaitu: (1) kemiskinan absolut, apabila hasil pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan. (2) Miskin relatif, sebenarnya seseorang telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. (3) Kemiskinan struktural, berkaitan dengan sikap seseorang yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 1 Undang-Undang ini menyebutkan:

“Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi kecil dan menengah.”

Di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah menguasai dan wajib menggunakan seluruh sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pengembangan sektor riil menjadi hal yang harus dilakukan pemerintah sebagai strategi pertumbuhan ekonomi guna menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sektor riil yang memiliki kontribusi terbesar antara lain sektor pertanian, perdagangan, dan industri.

Dalam mencapai pertumbuhan atau meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, daya saing, dan meningkatkan ekonomi nasional serta pengembangan wilayah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan pengembangan dan memaksimalkan sektor perkebunan, sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam. Maka pengembangan perkebunan tersebut perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab.

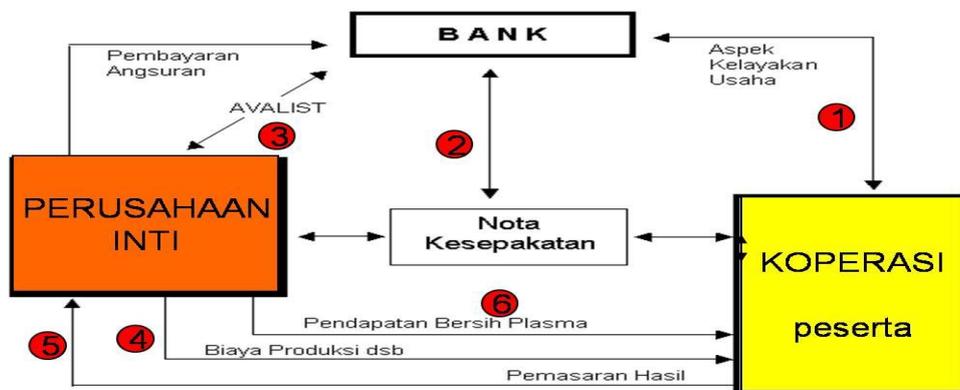
Perkebunan memiliki beberapa fungsi, yaitu secara ekonomi, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, secara ekologi, sebagai peningkatan konservasi tanah dan air, yang sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, secara budaya, berfungsi untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, maka pembangunan perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Sehingga, tujuan dari pembangunan perkebunan tersebut demi kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Di Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan salah satu desa yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Upaya pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana salah satunya yaitu dengan mendirikan koperasi Kompak Maju Bersama (KMB) dengan program Pola Kemitraan Inti Plasma atau disebut juga perkebunan inti rakyat (PIR) yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petani kebun kelapa sawit, kemitraan inti plasma atau perkebunan inti rakyat (PIR), dalam aspek teknik, dan berbudidaya untuk menyerap teknologi budidaya kepala sawit dari perusahaan inti. Selain itu juga menumbuhkan kesadaran, semangat untuk meningkatkan produktivitas kebun pola kemitraan inti plasma.

Pola kemitraan inti plasma atau di sebut juga perkebunan inti rakyat (PIR) pada desa riam durian juga dilakukan untuk mempersiapkan oragansiasi

petani (kelompok tani, koperasi, koperasi primer maupun sekunder), dalam melakukan pengelolaan kemitraan inti plasma atau pekebunan inti rakyat.

Pola kemitraan inti plasma atau pekebunan inti Rakyat adalah koperasi kompak maju bersma (KMB) di desa riam durian dalah pola untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi peserta dan didukung oleh suatu sistem pengelolaan usaha dengan memadukan berbagai kegiatan produksi, pengelolaan dan pemasaran dengan menggunakan perusahaan besar sebagai inti dalam suatu system kerjasama yang saling menguntungkan :



Gambar 1. mekanisme pola kemitraan inti plasma

(Sumber : <http://bangazul.com/evaluasi-penerapan-inti-plasma-pada-perkebunan-kelapa-sawit/>)

Pembukaan perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan inti plasma atau perkebunan inti rakyat (PIR) telah berkembang dan telah memberikan banyak manfaat seperti peningkatan pendapatan petani, pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan mendukung program

transmigrasi. Berdasarkan alas pembiayaan proyek, peserta proyek dan sasarannya

Kegiatan ini untuk peningkatan perekonomian masyarakat sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan di pedesaan dan mampu berperan secara aktif dalam sistem agribisnis di wilayah perkebunan pola kemitraan. Inti plasma atau perkebunan inti rakyat ini mampu tingkatkan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan. Selain itu, sebagai upaya mengatasi masalah pengangguran di daerah pedesaan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidak berdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/tidak layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004)

Pengaruh positif dari investasi pengembangan masyarakat terhadap besarnya area yang dipengaruhi oleh klaim dapat dijelaskan dengan fakta bahwa jumlah uang yang besar dikeluarkan dalam satu desa kecil. Hal ini

akan memunculkan celah yang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat keuangan yang besar dengan memunculkan konflik lahan. Sebagai tambahan, pengembangan infrastruktur (sosial, pendidikan, jalan, dll) adalah merupakan komponen kuat dalam program pengembangan masyarakat, mendorong kembalinya masyarakat yang telah meninggalkan desa (untuk mencari taraf hidup yang lebih baik) ke desa atau kebun mereka. Investasi tersebut menghasilkan insentif yang diperlukan bagi mereka untuk melakukan klaim hak atas tanah mereka (yang sebelumnya ditinggalkan) yang telah menjadi konsesi.

Selanjutnya, beberapa bentuk pengeluaran menjadi lemah untuk dijelaskan penggunaannya, dan meninggalkan celah penggunaan uang yang menguntungkan satu atau beberapa anggota masyarakat, sehingga terdapat kemungkinan pengeluaran uang yang tidak untuk memecahkan isu konflik lahan masyarakat dan dapat memungkinkan timbulnya konflik lainnya. Walaupun hasil studi ini tidak mendukung pengurangan atau peniadaan biaya-biaya pengembangan masyarakat, perusahaan perlu untuk lebih memahami alasan dan motivasi dari klaim dan bagaimana menginvestasikan Pengembangan Masyarakat untuk mendapatkan manfaat bagi kedua pihak, masyarakat dan perusahaan. Pada tingkat perusahaan, analisis yang lebih dalam diperlukan untuk mengkaji alasan-alasan klaim ketika perusahaan menemukan lahan sedang dipengaruhi klaim lebih luas, dimana uang yang sudah dibelanjakan juga lebih besar. Temuan kita memperlihatkan perlunya

pemikiran ulang secara benar bagaimana membelanjakan uang dalam pengembangan masyarakat.

Pola Kemitraan Inti Plasma pada dasarnya merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan yang luas wilayah desanya banyak dialokasikan untuk perkembunan kelapa sawit. Upaya pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana salah satunya yaitu dengan mendirikan koperasi Kompak Maju Bersama dengan salah satunya program Pola Kemitraan Inti Plasma yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petani kebun kemitraan atau petani plasma dalam aspek teknik, budidaya atau menyerap alih teknologi budidaya kepala sawit dari perusahaan inti. Selain itu juga menumbuhkan kesadaran, semangat untuk meningkatkan produktivitas kebun kemitraan.

Pola kemitraan pada Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama bertujuan untuk melepaskan diri dari kesibukan produksi utama

(primer) semakin kuat. Oleh karena itu, mereka menyerahkan produksi utama tersebut kepada para petani melalui mekanisme kontrak, sehingga dapat mengakses beberapa keuntungan sekaligus. *Pertama*, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya investasi besar untuk persiapan dan penyediaan tanah, baik untuk pembebasan maupun untuk pengolahan lahan. Semua biaya tersebut telah ditanggung petani plasma. *Kedua*, keuntungan lain berkaitan dengan proses penanganan komoditas yang menuntut perhatian dan ketelitian dalam proses produksi. Dari sisi ini, kontrak memungkinkan perusahaan dapat mengontrol proses produksi dengan efektif yang sebanding dengan sebuah perkebunan besar tanpa harus terlibat secara penuh dalam persoalan teknis di lapangan.

*Ketiga*, model kemitraan Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama juga memberikan hak monopoli terhadap komoditas yang disepakati dalam kontrak. Pada kebanyakan kasus, hak monopoli tidak hanya pada komoditas yang telah disepakati tetapi juga mencakup seluruh kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Proses ini secara tidak sengaja menimbulkan ketergantungan petani kepada pihak perusahaan. *Keempat*, dari sudut isu pembangunan masyarakat, pengembangan pola kemitraan pada Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama memungkinkan perusahaan mendapat citra positif dan memudahkan mereka mendapatkan fasilitas kredit lunak terutama dari bank-bank pemerintah, ataupun berbagai bentuk dukungan pemerintah yang menguntungkan pihak perusahaan. Hasil penelitian Mufid Dahlan (2013) menunjukkan bahwa pola kemitraan

menempatkan peternak sebagai pengelola atau buruh pelihara, sehingga peningkatan produktifitas, efesiensi faktor produksi dan performa ayam merupakan faktor penentu pendapatan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pola kemitraan yang sedang berkembang, sehingga terjadi perbaikan posisi tawar peternak lebih tinggi.

Pola kemitraan juga dilakukan untuk mempersiapkan oragansiasi petani (kelompok tani, koperasi, koperasi primer maupun sekunder dalam melakukan pengelolaan kemitraan atau plasma inti. Kegiatan ini untuk peningkatan perekonomian masyarakat sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan di pedesaan dan mampu berperan secara aktif dalam sistem agribisnis diwilayah perkebunan pola kemitraan. Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian ini yaitu: **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, (Study Pada Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, prov. Kalimantan Tengah )**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma (study pada perkebunan kelapa sawit Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama kab. Kota waringgin barat prov. Kalimantan tengah)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma, (study pada perkebunan kelapa sawit Desa

Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama kab. Kota waringgin barat prov. Kalimantan tengah)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma (study pada perkebunan kelapa sawit Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama kab. Kota waringgin barat prov. Kalimantan tengah)?
2. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma (study pada perkebunan kelapa sawit Desa Riam Durian, Kec. Kotawaringin Lama, kab. Kota waringgin barat, prov. Kalimantan tengah)?

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah baik secara langsung maupun tidak langsung bagi instansi yang terkait, bagi universitas dan bagi mahasiswa. Adapun kegunaan penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Akademis/Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma, perkebunan kelapa sawit Desa Riam Durian.

## 2. Kontribusi Praktis

Dapat digunakan sebagai menjadi bahan masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan alternatif untuk merencanakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mensistematiskan pembahasan serta memudahkan penguraian, skripsi ini akan terdiri dari tiga bab. Masing-masing bab akan dibagi lagi kepada beberapa sub bab sesuai dengan keperluan bahasan dan keperluan pembahasan dan tuntutan penguraian.

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penyelesaian skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Administrasi Publik**

##### **1. Pengertian Administrasi Publik**

Administrasi secara umum menurut Herbert A. Simon yang dikutip oleh Ahmad (2006:13-16), dapat didefinisikan sebagai “kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.” Pengertian administrasi selanjutnya disampaikan oleh Liang Gie (1983:34), bahwa “administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai suatu tujuan tertentu.”

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi pada prinsipnya mengandung arti yaitu suatu proses kegiatan kerjasama, dilakukan oleh banyak orang, untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik dinyatakan sebagai administrasi publik.

Administrasi telah berkembang di banyak negara. Banyak para ahli menyimpulkan arti dari administrasi publik sendiri diantaranya menurut Tjokroamidjojo (1987:4) menjelaskan bahwa “segenap proses penyelenggaraan usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal tujuan tersebut adalah tujuan negara/pemerintahan

maka menjadi lingkup wilayah ilmu administrasi publik. Proses kerjasama untuk mencapai tujuan harus didasarkan pada rasionalitas.” Hal ini ditekankan oleh Waldo (2009:35) yang menjelaskan bahwa “administrasi publik mengandung dua pengertian yaitu:

1. Administrasi publik yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
2. Administrasi publik yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.”

Kalau definisi-definisi diatas dikaji secara seksama, dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran bahwa:

1. Administrasi publik adalah merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggaraan.
2. Administrasi publik disusun untuk mengatur kerjasama antarelemen yang terdapat pada instansi pemerintah.
3. Administrasi publik diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dari suatu negara.
4. Administrasi publik diselenggarakan untuk kepentingan umum.

Perkembangan pemikiran lain di dalam ilmu administrasi terus berkembang, menurut Kartasmita (1997:24), “perkembangan yang cukup mendasar telah terjadi dengan munculnya kebijakan publik sebagai paradigma administrasi publik. Didalamnya tercakup perumusan kebijaksanaan, teknis analisis kebijakan, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.”

## **2. Sejarah Perkembangan Administrasi**

Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan sumberdaya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama, baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap individu, organisasi bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat hidup. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradaban manusia namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukkan kompleksitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem pengadministrasian yang kompleks pula.

Ada kecenderungan dalam masyarakat luas di Indonesia, bahwa administrasi dipersepsikan dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitas-aktivitas kantor, urusan surat-menyurat yang sering juga di sebut dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi memiliki cakupan arti yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi dan sebagai institusi dari tiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Demikian pula dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks yang sering disebut dengan Administrasi Negara. Sejalan dengan

perkembangannya, istilah “Negara” digantikan dengan “Publik” untuk menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik (*Public Service*).

Sejarah Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SAPRI) dimulai dengan diproklamirkannya kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak itu berbagai perubahan Sistem Administrasi Publik telah kita lalui mulai kepemimpinan Ir. Sukarno selaku Presiden RI Pertama hingga masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Penulis dalam hal ini mencoba menyoroti perkembangan Sistem Administrasi Publik yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-an dan dikenal dengan nama Sistem Demokrasi Liberal.

Sebagai dampak dari perubahan global, administrasi publik akan mengalami perubahan mendasar terutama peran dan orientasi yang ingin dicapai. Menurut Osborne dalam Kartasasmita (1997:23), “dalam era global kita melihat berkembang dan tumbuhnya sistem administrasi publik dan pemerintahan yang semakin efisien, efektif.” Pergeseran peran telah mulai terjadi dimana fungsi pemerintah dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial telah bergeser dari peran pemerintah yang begitu besar ke arah mendorong lembaga-lembaga masyarakat atau swasta untuk mengambil bagian yang besar dalam menjalankan sebagai fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah cukup hanya berfungsi sebagai pengarah tidak lagi berfungsi sebagai pengatur yang dominan. Hal ini berimplikasi pada adanya keinginan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan

partisipasi dalam pembangunan. Perubahan peran administrasi publik akan selalu seiring dengan dinamika masyarakat dimana sistem administrasi negara itu berada.

Administrasi negara harus menciptakan keadilan sosial, berdasarkan kebutuhan pada semua lapisan masyarakat. Hal ini berarti administrasi negara berusaha untuk merubah kebijakan-kebijakan maupun struktur-struktur yang secara sistematis merintanginya terciptanya keadilan sosial. Administrasi publik memiliki fungsi untuk menjalankan kebijaksanaan dan program-program kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka hirarki kebijaksanaan. Sehubungan dengan hal ini perkembangan administrasi publik akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan tuntutan dan aspirasi dan pelayanan kebutuhan masyarakat yang cenderung selalu dinamis.

## **B. Administrasi Pembangunan**

### **1. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan (dalam Suryono, 2010: 1) berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, “bangun” juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Lebih dari itu, kata “pembangunan” menjadi bahasa dunia dan melahirkan berbagai konsep seperti: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), dan sebagainya.

Pembangunan menurut Siagian (dalam Hakim, 2011) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Ini jelas bahwa keinginan pembangunan dilakukan dengan pengembangan dan pembinaan.

Selanjutnya, Sumodiningrat (2009: 56) mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan struktur yang berdasarkan kemampuan sendiri, mensyaratkan lima kegiatan pembangunan yang tak terpisahkan dan membentuk *circular flow* yaitu:

1. Produksi dan penciptaan lapangan kerja
2. Meningkatkan pendapatan guna
3. Meningkatkan tabungan yang berguna
4. Pembentukan modal
5. Perubahan teknologi

Pada hakikatnya pembangunan adalah sebuah perubahan. Perubahan ke arah progress adalah pembangunan, dimana pembangunan masyarakat merupakan suatu realitas sosial pada fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat (Soetomo, 2011: 27). Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan harus dituangkan dalam bentuk pelayanan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nurcholis (2011: 104) menjabarkan pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa atau kelurahan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya modal dan

sumber daya manusia untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Tujuan utamanya adalah membawa perubahan kebaikan bagi kehidupan sosial masyarakat.

## 2. Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan mengalami pergeseran seiring dengan pengalaman yang berbeda dari berbagai bangsa di dunia. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan yang diamati membawa interpretasi yang tidak statis tentang pembangunan. Suryono (2010: 15-22) menjabarkan setidaknya enam (6) pergeseran paradigma pembangunan yang terdiri dari:

### a. *Growth Paradigm* (paradigma pertumbuhan)

Dimulai sekitar tahun 1960-an yang dilakukan banyak negara-negara berkembang dengan mengadopsi pendekatan “*growth priority*” yang memfokuskan diri pada akumulasi capital nasional, *Gross National Product* (GNP) sebagai ukuran keberhasilannya. Para pemikirnya yaitu Adam Smith, Harrod Domar, Nurkse dan Leibenstein. Melalui pendekatan ini memang pada akhirnya banyak terbukti berhasil meningkatkan akumulasi capital dan pendapatan perkapitanya, namun disisi lain telah membawa dampak seperti kesenjangan sosial dan dependensi.

### b. *Growth with Distribution Paradigm* (paradigma pertumbuhan dengan pemerataan)

Menggunakan strategi utama “*employment-oriented development*”. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan empat pendekatan dasar untuk meningkatkan pendapatan golongan paling miskin, terdiri dari: (a) meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal. (b) mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit dan fasilitas umum. (c) mendistribusikan pendapatan kepada golongan miskin melalui sistem fiskal atau alokasi barang konsumsi secara langsung. (d) pengalihan harta yang sudah ada kepada golongan miskin dengan *land reform*. Karena sifatnya *capital insentive* maka hanya orang berpendidikan dan berketrampilan yang dapat memanfaatkan pendekatan ini.

### c. *Appropriate Technology Paradigm* (paradigma teknologi tepat guna)

Disebut juga teknologi tepat guna, yang menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola kebutuhan masyarakat melainkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan

barang-barang produksi dengan cara padat karya. Namun pendekatan ini juga dianggap kurang berhasil karena tidak menciptakan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan nasional.

- d. *Basic Need Development Paradigm* (paradigma kebutuhan dasar pembangunan)

Konsep dasarnya adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Selama penduduk miskin sebagian besar terdapat di pedesaan, maka pendekatan *basic need* ini menjadi tekanan dan unggulan dari pembangunan pedesaan. Dengan demikian, konsepnya bukan "*central planning*" melainkan lebih bersifat "*community development*".

- e. *Sustainable Development Paradigm* (paradigma pembangunan berkelanjutan)

Dilatarbelakangi karena adanya kerusakan hutan di Eropa, kelaparan di Afrika, menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca yang menyebabkan "*global warning*". Konsep *sustainability* diartikan sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi dan merugikan kebutuhan generasi masa mendatang. Konsekuensinya, pembangunan saat ini jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang melainkan dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

- f. *Empowerment Paradigm* (paradigma pemberdayaan)

Pada intinya konsep "*empowerment*" memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Menurut Friedmann pemberdayaan masyarakat tidak sebatas pada ekonomi saja namun juga secara politis sehingga masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun secara internasional.

Berdasarkan uraian beberapa paradigma pembangunan di atas mulai dari paradigma pertumbuhan (*Growth Paradigm*) hingga paradigma pemberdayaan (*Empowerment Paradigm*) mengisyaratkan lahirnya sebuah pemberdayaan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek di dalamnya

## C. Pemberdayaan Masyarakat

### 1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subyek dan obyek.

Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antarsubyek dengan subyek yang lain (Vidhyandika 1996:135). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Menurut Tjandraningsih (1996:3), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dalam studi dan teori tentang pembangunan dan kemiskinan, pemberdayaan merupakan istilah yang relatif baru. Di tengah pengaruh kuat teori modernisasi, kegagalan pembangunan, keterlambatan sekelompok masyarakat merespon kemajuan dan masih merebaknya persoalan kemiskinan cenderung hanya dicari dan bersumber dari kesalahan mental dan nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang miskin itu sendiri.

Gejala kemiskinan di kota erat kaitannya dengan langkanya peluang kerja yang produktif (Friedmann, 1981 : 129). Penduduk, baik pendatang desa-kota maupun penduduk kota yang baru masuk angkatan kerja, dengan kemampuan yang ada menciptakan kesempatan kerja dengan memanfaatkan kehidupan kota (Effendi, 1983). Dalam banyak kasus penghasilan mereka hanya dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari meskipun mereka telah bekerja keras. Jadi, dapat dikatakan bahwa kemiskinan lebih

disebabkan oleh keadaan ekonomi daripada kebudayaan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan perlu dipikirkan konsep yang dapat membantu menumbuhkan kemampuan ekonomi daripada perbaikan kondisi lingkungan.

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Itu berarti bahwa pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk memandirikan keluarga, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki keluarga. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan keluarga baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam Lembaga Swadaya Masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan keluarga harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi keluarga. Dalam kerangka pemikiran demikian, upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi keluarga berkembang. Artinya, setiap anggota keluarga dapat secara alamiah memiliki potensi yang dapat dikembangkan menuju kehidupan yang lebih baik. *Kedua*, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki keluarga. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi keluarga berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan

yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang (Warta Demografi, 1997) Kartasasmita (1996) mengemukakan pendapatnya bahwa upaya pemberdayaan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan pemberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian kemandirian setiap individu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. *Ketiga*, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Di mata Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Peran program pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dengan menganut beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*).
- b. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
- c. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*).
- d. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*).
- e. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*). (Gunawan Sumodiningrat, 1999). Sumodiningrat (1999) juga mengemukakan indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang mencakup :
  - f. Berkurangnya jumlah penduduk miskin Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
  - g. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya
  - h. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial dengan kelompok lain
  - i. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

## **2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

### **3. Proses Pemberdayaan**

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang mene-kankan pada proses memberikan atau

mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog". Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus

dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

#### **4. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat**

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap

perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

### **5. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan**

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan bagi paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material.

Korten dalam Harry Hikmat (2001:16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. *Pertama* memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga dan komunitas. *Kedua* mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi. *Ketiga* mengembangkan sistem-sistem

produksi-konsumsi yang di organisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (empowerment).model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus di capai oleh proses pembangunan.

Pemberdayaan merupakan langkah yang tepat dalam pembangunan lapisan bahwa hanya saja pemberdayaan memerlukan keterlibatan pihak lain selain masyarakat yang diberdayakan itu sendiri dan pihak lain tersebut yang harus benar-benar konsisten dalam program pemberdayaan adalah pemerintah karena pemerintah mempunyai tanggung jawab besar atas keadaan setiap rakyatnya. Hal tersebut akan membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yang mengikat masyarakat miskin dan lembaga terutama lembaga pemerintah yang bertanggung jawab. Batasan tersebut juga akan menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat miskin dan pekerja social mejlankan fungsunya masing-masing.

Strategi pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan namun penulis mencermati lima strategi ini menyangku dan mendasari tentang penting peran pemerintah dalam pemberdayaan, (Suharto, 1997:218-219):

1. Pemungkinan: menciptakan suasana tau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-keebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
3. perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak simbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mmampu menjalankan peranan dan tugas-tugas hidupnya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Poin-poin tersebut memang tidak menyebutkan pranan pemerintah didalamnya namun dalam poin-poin yang dikemukakan oleh Edi Suharto

tersebut banyak mengungkapkan tentang manfaat dan pentingnya peranan pemerintah dalam program pemberdayaan.

## **6. Strategi dan Upaya Pemberdayaan**

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan secara optimal tentunya diperlukan strategi dan upaya yang secara nyata dapat ditempuh oleh pemerintah. Menurut Mashoed (2004: 40) upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menetapkan:

1. Strategi dasar acuan dalam merumuskan kebijakan
2. Kerangka rencana mikro yang membuat berbagai sasaran yang harus dicapai.
3. Masyarakat sendiri harus memiliki perkiraan sumber-sumber pembiayaan.
4. Kerangka dan perangkat kebijakan berupa program pembangunan pedesaan.

Sementara itu, Harry Hikmat (2010: 19) menyebutkan strategi pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Strategi Tradisional  
Menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
- b. Strategi *Direct-Action*  
Membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak.
- c. Strategi Transformatif  
Menunjukkan bahwa pendidikan masa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum mengidentifikasi diri sendiri.

Fahrudin (2011: 18-19) mengutarakan secara garis besar, strategi dan teknik pemberdayaan dapat dilihat dari tiga bentuk intervensi yaitu azas mikro, mezzì dan makro. Intervensi mikro ditujukan kepada individu dan

keluarga, intervensi mezzo ditujukan kepada kelompok kecil sedangkan intervensi makro ditujukan kepada organisasi dan masyarakat.

Sejalan apa yang diutarakan di atas, Suharto dalam Huraerah (2008:

92) juga menjelaskan model pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga aras atau mantra diantaranya:

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered oriented*).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pemberdayaan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strataegi yang tepat untuk bertindak.

Konsep pemberdayaan itu sendiri tidak bisa terlepas dari prinsip kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu utama dalam pembangunan saat ini. Partisipasi aktif di Negara-negara berkembang dinilai sebagai strategi aktif untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya.

Dengan adanya beberapa strategi di atas, harapannya masyarakat mampu mencapai keberdayaan, unsur-unsur yang memungkinkan mereka

dapat bertahan, mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dimana saat ini mereka sulit untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh sebab itu, penerapan strategi yang tepat akan dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah.

#### **D. Kemitraan**

##### **1. Pola Kemitraan**

Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak padalandakan yang sama, kesediaan untuk berkorban.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Adapun unsur-unsur kemitraan yaitu:

- Adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih.
- Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut (equality).

- Adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak tersebut (transparancy).
- Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat (mutual benefit).

## **2. Jenis atau Pola Kemitraan**

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Usaha Kecil ditentukan pola-pola kemitraan sebagai berikut:

### **a. Inti Plasma**

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

### **b. Subkontrak**

Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Kelemahan pola subkontrak ini adalah pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil.

Manfaat yang diperoleh pengusaha kecil melalui pola subkontrak ini adalah dalam hal :

1. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen.
2. Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku.

3. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan atau manajemen.
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang digunakan.
5. Pembiayaan.

### **c. Modal Ventura**

Modal Ventura dapat didefinisikan dalam berbagai versi. Pada dasarnya berbagai macam definisi tersebut mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal.

Meskipun prinsip dari modal ventura adalah “penyertaan” namun hal tersebut tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.

### **3. Tujuan Kemitraan**

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Sehubungan dengan itu, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang bedasar pada asas kekeluargaan.

Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui :

- Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan Usaha Kecil;
- Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas yang optimal diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan lahan. Sinergi ini dikenal dengan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat, dunia usaha baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing.

Adapun secara lebih rinci tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, yang diantaranya yaitu :

#### **a. Tujuan dari Aspek Ekonomi**

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu :

- Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;

Mengenal tiga jenis efisiensi diantaranya yaitu pertama, efisiensi teknis adalah cara yang paling efektif dalam menggunakan suatu sumber yang langka (tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain sebagainya) atau sejumlah sumber dalam suatu pekerjaan tertentu. Kedua, efisiensi statis meliputi efisiensi teknis

yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu, dengan kata lain, efisiensi ekonomi diperoleh bila tak ada kemungkinan realokasi sumber lain yang dapat meningkatkan output produk lainnya. Ketiga, efisiensi dinamis, pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini. Jadi walaupun dua perekonomian mungkin telah meningkatkan persediaan modal dan tenaga kerja mereka dengan persentase yang sama, tapi tingkat pertumbuhan nasional dalam kedua kasus ini mungkin sangat berlainan.

#### **b. Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya**

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

#### **c. Tujuan dari Aspek Teknologi**

Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan

teknologi. bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

#### **d. Tujuan dari Aspek Manajemen**

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil yang lebih baik, apabila satu individu bertindak sendiri. maka peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemennya akan rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi.

### **E. Pola Inti Plasma**

#### **1. Definisi Inti Plasma**

Program Pembangunan Perkebunan kelapa sawit Melalui Pola inti plasma Didasarkan Pada Kepres No. 1 Tahun 1986, Pola inti plasma Ini Bertujuan untuk Meningkatkan Produksi Non Migas, Meningkatkan Pendapatan Petani, Membantu Pengembangan Wilayah Serta Menunjang Pengembangan Perkebunan, Meningkatkan pemberdayaan Di Wilayah inti Plasma. Dan membantu dan membimbing kelompok tani dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh dan kesinabungan.

Kebun inti plasma adalah kebun yang berada dalam perusahaan inti yang di bangun untuk perkebunan inti rakyat desa riam duiran yang di kelola oleh kelompok tani dalam koperasi kompak maju bersama (KMB) tapi masih dalam pengawan perusahaan inti, kelompok tani ini yang berfungsi

mengkoordinir pemeliharaan, perawatan, panen, transportasi dan penjualan hasil produksi dari perkebunan inti plasma wilayah desa riam durian kecamatan kotawaringinlama

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa inti plasma atau perkebunan inti rakyat dianggap sebagai forum masyarakat dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat yang berhak menilai rencana usulan kegiatan dalam cakupan jenis kegiatan-kegiatan di koperasi kompak maju bersama juga dianggap sebagai jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan desa/kelurahan. Pengenalan inti plasma atau perkebunan inti rakyat ditujukan pada upaya kemampuan yang ada dalam masyarakat melalui peningkatan perannya. Oleh karena itu, inti plasma atau perkebunan inti rakyat (PIR) yang dikelola oleh koperasi kompak maju bersama (KMB) di anggotakan oleh kelompok tani desa riam durian kecamatan kotawaringin lama dapat dijalankan dan berfungsi sebagai peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa riam durian.

## **2. Maksud Dan Tujuan Inti Plasma**

Pola inti plasma atau perkebunan inti rakyat (PIR) didirikan dengan maksud untuk menaggulangi kemiskinan di masyarakat,. Inti plasma atau perkebunan inti rakyat mengorganisasikan kelompok tani untuk meningkatkan pengelolaan dan produksi untuk jangka panjang, pola inti plasma atau disebut perkebunan inti rakyat (PIR) adalah membangun modal sosial (*capita social*) dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan sosial menggalang solidaritas kebersamaan masyarakat untuk saling

bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat dalam kepentingan dan kebutuhan bersama.

inti plasma atau perkebunan inti rakyat adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan besar sebagai inti, yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam satu sistem kerja sama yang saling menguntungkan. Perkebunan inti rakyat memobilisasi keunggulan atau keahlian teknis dan manajerial yang dimiliki perkebunan besar untuk membantu mengembangkan perkebunan plasma. Badrun, M. (2010)

sedangkan Mangoensoekarjo, S. dan Semangun, H. (2008). Menjelaskan :

Mengingat pembangunan kebun inti plasma membutuhkan proses atau jangka waktu yang lama maka dibutuhkan pembinaan dari pihak yang berpengalaman untuk membantu perusahaan dalam merealisasikan pembangunan kebun plasma dengan sepuluh tahapan pelaksanaan yang perlu dilakukan : sosialisasi, penetapan struktur organisasi perkebunan inti plasma, pembentukan koperasi, dan dokumen kelengkapan organisasi, perijinan kebun plasma (legalitas), pembanguana kebun, *pre financing* dan pembiayaan kebun plasma, penilaian kebun plasma, pembagian hasil kebun plasma, pembinaan admin dan teknis kebun, pembinaan pasca kredit lunas.

Berdasarkan penjababaran di atas dapat dikatakan bahwa inti plasma dianggap sebagai forum masyarakat dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat yang berhak menilai rencana usulan kegiatan dalam cakupan jenis kegiatan-kegiatan pemberdayaan juga dianggap sebagai jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan. dan ditujukan pada penciptaan lembaga-lembaga baru melainkan ditujukan pada upaya pemampuan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat melalui peningkatan perannya. Oleh karena itu, inti plasma atau pekebunan inti dapat dijalankan oleh masyarakat

yang bernaung dalam koperasi kompak maju bersama (KMB) yang telah ada, yang masih berakar dan berfungsi dalam masyarakat.

### **3. Indikator Kinerja Inti Plasma**

Pihak perkebunan besar sebagai inti dengan perkebunan rakyat sebagai plasma memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban dari perusahaan inti:

1. Membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan plasma.
2. Melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan standar operasional yang telah diatur.
3. Bertindak sebagai pelaksana penyiapan fasilitas umum.
4. Membina petani agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik.
5. Membeli hasil kebun plasma.

Kewajiban petani plasma:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengusahaan kebunnya sesuai dengan standar operasional yang telah diatur oleh perusahaan inti.
2. Menjual hasil produksi kebun plasmanya kepada perusahaan inti.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50).

Sementara itu, yang menjadi kewenangan inti plasma diantaranya:

- a) Menetapkan usulan Kelompok dari ke angotaan koperasi yang diprioritaskan pendanaannya setelah usulan dinilai layak.
- b) Mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan kepada inti plasma.
- c) Memantau aktivitas koperasi kompak maju bersama (KMB) setelah memperoleh pencairan dana.
- d) Mengelola dana bantuan melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Dengan demikian, indikator kinerja di atas sangat diperlukan dalam memaksimalkan kegiatan pola inti plasma itu sendiri melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan. Untuk itu kualitas sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal perlu dimaksimalkan demi tercapainya visi pola inti plasma.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Di dasarkan pada permasalahan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan masalah dalam suatu kondisi, tata cara dalam situasi tertentu, hubungan antar kegiatan, sikap serta proses yang sedang berlangsung. Menurut Kountor (2004:105), “penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.” Sedangkan Nazir (2003:54) berpendapat bahwa “penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” Digunakannya jenis penelitian ini adalah bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Kemudian di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Kountur (2004:16) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar.” Dipilihnya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini sebab penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

## **B. Fokus Penelitian**

Pentingnya fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ialah untuk membatasi studi dan membatasi bidang *inquiry*. Tanpa adanya proses penelitian maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperolehnya di lapangan. Karena itu, fokus penelitian memiliki peranan penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahan. Sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait, karena permasalahan penelitian dijadikan acuan penentuan fokus penelitian meskipun dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditentukan di lapangan. Fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian
  - a. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian
  - b. Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma Desa Riam Durian
  - c. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian
  - d. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.

2. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.

a) Faktor Pendukung

b) Faktor Penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Menurut Moleong (2005:76), “cara terbaik dalam penentuan lokasi adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.” Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga juga perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Data diperlukan dalam penelitian baik sebagai bahan untuk deskripsi maupun untuk memperkaya informasi dalam mengambil kesimpulan. Data merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yakni data yang berupa kata-kata serta tindakan yang diamati oleh peneliti terhadap obyek atau subyek penelitian (Fuad dan Nugroho, 2014:57). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan wawancara atau interview kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Data sekunder, menurut Kusmayadi dan Sugiarto (2000:80) data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dalam bentuk publikasi, seperti laporan tahunan, *company profile*, dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Arikunto (2006:134) mengemukakan bahwa “teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.” Cara menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya diperhatikan penggunaannya. Dalam rangka memperoleh data lapangan yang relevan dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *Field Research* (studi lapangan) yaitu merupakan teknik pengumpulan data melalui terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan melakukan:

1. Observasi

Observasi merupakan cara dalam mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung.

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung

dengan sumber informasi. Sumber informasinya berupa orang (narasumber) yang merupakan sumber data yang berjenis data primer, pada metode ini peneliti berhadapan langsung (tatap muka) dengan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dalam memperoleh data yang bersifat sekunder, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini, peneliti tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran isian yang telah disiapkan untuk itu, atau merekam sebagaimana adanya.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan panca indra untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lokasipenelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat mengumpulkan data yang utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lokasipenelitian.

## 2. Pedoman Wawancara

Merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Pedoman wawancara ini merupakan sebuah instrument penting yang berfungsi untuk memandu peneliti dalam mengumpulkan data selama selama penelitian, sehingga sesuai dengan fokus penelitian ini.

## 3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi berupa daftar-daftar mengenai naskah kearsipan, baik berbentuk barang cetakan ataupun rekaman yang diperlukan, daftar mengenai foto-foto dokumentasi penelitian.

## **G. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2009:268-277), pengujian keabsahan data meliputi:

### 1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara (baik triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu), dan diskusi dengan teman sejawat.

## 2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2009:277), “bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam suatu penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.”

## 3. Uji Reabilitas (*Reability*)

Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji reabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Faisal (dalam Sugiyono, 2009:277) bahwa, “jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas di lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.”

## 4. Uji Obyektivitas (*Confirmability*)

Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

## H. Analisis Data

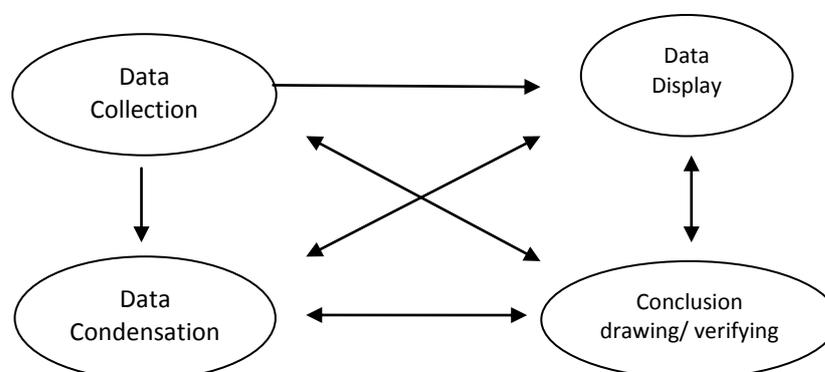
Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulann

susunan kata dan kalimat. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan.

Menurut Nawawi dan Hadari (1983:25) “dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal dan selama proses penelitian berlangsung dan data atau informasi yang diperoleh harus dianalisa, berupa usaha menafsirkan untuk mengetahui maknanya serta dihubungkan dengan masalah penelitian.” Analisa kualitatif digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian dengan jawaban yang tepat.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data. Seperti dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana(2014:31-33), di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.*

### **Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kalimantan Tengah**

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Tengah terletak di daerah lintasan katulistiwa yaitu pada posisi  $00^{\circ}44'54''$  Lintang Utara -  $03^{\circ}47'07''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}43'19''$  -  $115^{\circ}47'36''$  Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat (Dephut, 2014). Gambar peta Provinsi Kalimantan Tengah dapat disajikan pada gambar 4.1.

#### **Gambar 4.1**

#### **Gambar peta Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber: Bps. Provinsi Kalimantan Tengah

## **2. Iklim**

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmid dan Ferguson, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk tipe iklim A, hal ini ditandai dengan adanya jumlah bulan basah lebih banyak dari bulan kering dan pola penyebaran curah hujan hampir merata pada semua wilayah. Agroklimat Kalimantan Tengah terdiri dari 4 klas, yaitu: Klas A di bagian Utara, Klas B1 di Bagian Tengah, Klas C1 dan C2 di Bagian Selatan. Semakin ke bagian Utara curah hujan semakin tinggi. Karakteristik iklim, tropis lembap dan panas yang tergolong ke dalam tipe iklim A dengan suhu udara relatif konstan sepanjang tahun, yang dapat mencapai 23°C pada malam hari dan 33°C pada siang hari, dengan penyinaran matahari mencapai 60% pertahun. Curah hujan rata-rata 200 mm/bulan dengan kecepatan angin rata-rata 4 knot/Km. Curah hujan rata-rata sebesar 2.732 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 120 hari. Sebagian besar daerah pedalaman yang berbukit, bercurah hujan antara 2.000 - 4.000 mm per tahun. Musim penghujan biasanya dimulai pada bulan September sampai bulan Mei, dan puncaknya pada bulan November dan April. Iklim yang relatif lebih kering dimulai dari bulan Juni sampai Agustus (Dephut, 2014).

## **3. Topografi**

Kondisi fisik wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai dan rawa yang terdapat di wilayah Bagian Selatan sepanjang ± 750 km pantai Laut Jawa, yang membentang dari Timur ke Barat dengan

ketinggian antara 0 – 50 m di atas permukaan laut (dpl) dan tingkat kemiringan 0%-8%. Sementara itu wilayah daratan dan perbukitan berada bagian tengah, sedangkan pegunungan berada di bagian Utara dan Barat Daya dengan ketinggian 50 – 100 mdpl dan tingkat kemiringan rata-rata sebesar 25% (Dephut, 2014).

#### **4. Penduduk**

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2.212.089 jiwa yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 740.256 jiwa (33,46%) dan di daerah perdesaan sebanyak 1.471.833 jiwa (66,54%). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 2,03% di Kabupaten Sukamara hingga yang tertinggi sebesar 16,92% di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penduduk laki-laki Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.153.743 jiwa dan perempuan sebanyak 1.058.346 jiwa (Dephut, 2014).

#### **5. Sosial, Ekonomi dan Budaya**

Kalimantan Tengah dihuni oleh berbagai suku bangsa, diantaranya Dayak, Jawa, Banjar, Batak, Toraja, sampai Papua dan lain-lain. Suku yang sangat dominan adalah Dayak. Bahasa daerahnya cukup beragam. Namun, dalam pergaulan sehari-hari, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Dayak Ngaju, Dayak Maayan, Dayak Kapuas, bahasa Jawa, dan bahasa budaya/tradisi lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Budaya/tradisi lokal ini syarat dengan nilai-nilai kearifan dan sudah diterapkan semenjak jaman nenek moyang dahulu kala

hingga kini. Ada banyak cara bisa dilakukan untuk melindungi, menjaga serta melestarikan hutan, salah satunya dengan menerapkan hukum adat terhadap pelaku pengrusakan serta pembakaran hutan yang dilindungi. Seperti yang dilakukan masyarakat adat Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menerapkan hukum adat bagi pelaku pembakaran maupun pengrusak hutan.

Aturan adat ada kalau masyarakat di desa ini melanggar adat istiadat seperti membakar lahan tanpa memperhatikan kearifan lokal, maka akan disingkir dan diberi jipen, artinya hukuman denda atau ganti rugi (Riski, 2014). Hukum adat setempat mengatur sistem pengelolaan wilayah adat secara lokal pula. Hukum adat yang berakar pada budaya lokal ini, mengatur dan mengontrol proses pengelolaan wilayah adat yang dijalankan oleh warga komunitas agar sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Hukum adat disusun lebih untuk menjamin tetap terjaganya kelestarian alam beserta seluruh isinya demi kepentingan masyarakat itu sendiri (Riski, 2014).

## **6. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

Wilayah Kabupaten Kotawaringin memiliki luas wilayah sebesar 1.075.900 Ha atau sekitar 62 % luas dari luas wilayah propinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah tersebut diatas berbatasan dengan sebelah utara dengan Kabupaten Lamandau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Lamandau dan Sukamara. Berikut ini adalah data letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat: Ibukota:

1. Pangkalan Bun Luas Wilayah: 10.759 Km (1.075.900 Ha Letak Geografis
2. Daerah Bujur Timur : 110°25'26"-112°50'36"
3. Lintang Selatan : 1°19'35"-3°36'59"
4. Iklim Daerah Curah Hujan : 1.849, mm/th
5. Suhu rata-rata : 27,480C
6. Suhu Minimum : 21,60C – 23,40C
7. Suhu Maksimum: 31,7–33,20C. Kelembaban: 83 – 89 %

Bentuk Wilayah Berdasarkan Fisiografi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi empat bagian: daratan-berombak (daerah utara). Berombak dan berbukit-daerah berbukit

Sehubungan dengan Surat dari Kominfo Nomor: B- 164/ KOMINFO/ DJAI/AI.01.04/04/2015 perihal pengalihan pendaftaran domain desa.id maka PANDI meminta tanggapan dari anggota milis perihal hal tersebut. Isi surat dari Kominfo adalah seperti dibawah ini: Merujuk pada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 1 point 1 dan point 2 yang menyebutkan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Riam Durian *Website* ini akan segera kami luncurkan sebagai Website Resmi Desa Riam Durian. Namun untuk saat ini kami masih uji coba Website ini dan kami sedang dalam pengisian *content article* yang masih belum lengkap, maksud dan tujuan Desa Riam Durian memiliki website ini adalah untuk membangun desa lebih maju untuk Informasi Dan Teknologi, supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang Desa Riam Durian. Aparatur Desa Ikuti Pelatihan Manajemen Keuangan Perangkat Desa dan Kelurahan wajib melakukan transparansi penggunaan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja. Kewajiban tersebut menyusul bakal adanya gelontoran dana besar dari pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang Tentang Desa. Untuk mendukung program tersebut Pemkab Kobar memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan dalam bidang manajemen pengelolaan keuangan khususnya di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng.

Susun Profil Desa Dan Kelurahan Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang katakter Desa dan Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, Potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. “Tersusunnya profil desa dan kelurahan ini sangat penting,

karena dapat menunjukkan kinerja pembangunan dan menjadi dasar perencanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah diperlukan upaya peningkatan keterampilan aparat desa /kelurahan dalam mengelola dan mendayagunakan data profil desa dan kelurahan.

Adapun data terkait dengan luas lahan kebun Perkebunan Inti Rakyat, Jumlah Kelompok, Jumlah Anggota dan modal kepersertaan, yang secara lengkap dapat disajikan pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Luas lahan kebun Perkebunan Inti Rakyat, Jumlah Kelompok, Jumlah Anggota dan modal kepersertaan**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Luas lahan	820,33 Ha
2.	Jumlah kelompok	Tiga (3)
3	Jumlah anggota	84 anggota
4	Modal	Rp. 2.250.000.000,-

Sumber: Koperasi Kompak Maju Bersama, Tahun 2017

Adapun aktivitas yang dilakukan bagian yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma dapat disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.1. Aktivitas Panen Lahan Inti Plasma



Gambar 4.2 Proses Koordinasi Antar Anggota KMB



Gambar 4.3 Aktivitas kontrol di Lapangan



Gambar 4.4 Aktivitas Pendistribusi Pupuk



## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian melalui pola kemitraan inti plasma, perkebunan kelapa sawit (Study Pada Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama)**

#### **a. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian**

Desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni oleh kelompok masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Sedangkan secara administratif desa adalah yang terdiri dari satu atau lebih atau dusun yang digabungkan hingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri atau berhak mengatur rumah tangga sendiri (otonomi). Masyarakat desa cenderung bersifat homogen dimana biasanya masyarakat desa mempunyai kerabat yang masih berhubungan erat, sehingga sifat homogen ini mencerminkan kebersamaan yang terbentuk dalam sifat kegotong royongan sebagai ciri khas masyarakat desa. Pengertian Desa menurut UU R.I Nomor 6 Tahun 2014 BAB I Pasal 1 menjelaskan, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kepala Desa Riam Durian terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

”Menurut saya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di Desa Riam Durian, dimana bentuk pemberdayaan tersebut yaitu salah satunya adaya program Pola Kemitraan Inti Plasma. Bentuk kemitraan yang dilakukan yaitu dengan penanaman kelapa sawit dengan melakukan kerjasama antara kelompok tani dengan PT. Bumi Guna Jaya Agro. Proses kemitraan ini telah berjalan selama 8 tahun yang lalu”.

Tanggapan dari masyarakat terkait dengan keberadaan Pola Kemitraan Inti Plasma dapat ditunjukkan dari hasil wawancara kepada Bapak Yoyon Hartono, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Keberadaan pola Kemitraan Inti Plasma ini benar-benar membantu kondisi ekonomi masyarakat setempat, dimana keberadaan program ini secara langsung memberikan kemudahan pada petani dalam proses penanaman, pengolahan dan masa panen. Petani tidak terbebani dengan proses pemasaran produk sehingga keberadaan program tersebut sangat memberikan kemudahan dalam proses pengembangan usaha yang dijalankan petani”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yance selaku petani dan menjadi anggota Pola Kemitraan Inti Plasma, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Saya selaku petani yang sudah lama benar-benar merasakan adanya perubahan dari kondisi ekonomi yang saya alami, dimana sebelum adanya Pola Kemitraan Inti Plasma kondisi ekonomi keluarga kami saya rasakan pas hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Namun demikian setelah adanya program pola kemitraan inti plasma makakondisi ekonomi keluarga menjadi meningkat

yang dibuktikan dengan adanya kemampuan untuk membeli kebutuhan diluar kebutuhan bahan poko”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa adanya peningkatan kondisi ekonomi keluarga setelah adanya Pola Kemitraan Inti Plasma. Kondisi ini dikarenakan kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengelolaan sumberdaya tidak terfokus hanya pada pengelolaan sumberdaya alam saja, sumberdaya manusia juga penting pengaruhnya sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat.

**b. Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti PlasmaDesa Riam Durian**

Selain itu pengelolaan sumberdaya buatan juga penting, sumberdaya buatan adalah sumberdaya yang diciptakan sebagai bahan penunjang masyarakat berdaya. Pengelolaan sumberdaya manusia adalah prioritas sebelum mengelola sumberdaya alam, hak prerogatif pengetahuan masyarakat harus terpenuhi terlebih dahulu. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah sebuah nilai dari berkembang atau tidaknya masyarakat tersebut, perkembangan sumberdaya manusia secara tidak langsung akan menunjang pengelolaan sumberdaya alam. Refleksi dari sumberdaya manusia berkualitas adalah pengelolaan sumberdaya alam lebih kreatif, inovatif, dan dapat menghasilkan lebih dari sebelumnya. Upaya pengembangan kondisi ekonomi masyarakat desa

melalui Pola Kemitraan Inti Plasma dapat diketahui dari hasil wawancara kepada Bapak Joko Catur sebagai berikut:

“Pola Kemitraan Inti Plasma ini merupakan bentuk kemitraan yang bertujuan dalam proses pemberdayaan masyarakat di desa, dimana program ini dirancang sesuai dengan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga potensi yang dimiliki oleh warga desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini yang menjadi tujuan utama dari Pola Kemitraan Inti Plasma. Selain itu program ini juga ditujukan sebagai upaya untuk pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat, bentuk pemberdayaan tersebut yaitu terkait dengan aktivitas masyarakat untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah”.

Selanjutnya menurut Bapak Yoyon Sartono, juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pada dasarnya pola kemitraan merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pola Kemitraan Inti Plasma sebagai salah satu upaya untuk pengelolaan sumberdaya alam tidak lepas dari program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat merupakan program yang sangat penting sebagai upaya dalam mengangkat kualitas hidup masyarakat meliputi bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pihak yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya pemerintah saja, pihak swasta juga turut serta berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri adalah memaksimalkan power masyarakat yang terkekang oleh minimnya pengetahuan

masyarakat dalam mencapai kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.

c. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian

Kepala Desa Riam Durian dalam hal ini Bapak H. Rowandi memberikan tanggapan terkait dengan aktivitas yang dilakukan pada Pola Kemitraan Inti Plasma sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami selaku perangkat desa benar-benar mendapatkan hasil dari kebijakan terkait dengan Pola Kemitraan Inti Plasma, sehingga potensi yang dimiliki oleh desa dapat sepenuhnya mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh desa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi target yang akan dicapai program tersebut. Jadi menurut saya keberadaan Pola Kemitraan Inti Plasma pada dasarnya untuk memperkuat kondisi ekonomi masyarakat”.

Adapun menurut Bapak Eed selaku sekretaris desa memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kami selalu berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga upaya-upaya nyata selalu kami lakukan untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, dimana salah satunya terkait dengan pola kemitraan”.

Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berbeda di dalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengelolaan sumberdaya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa memelopori pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan

keseimbangan alam dapat terlestarikan, semata orientasi kesejahteraan rakyat tercapai secara berjangka panjang. Cara desa dalam menjaga aset ekonomi ini berbalikan dengan model pemerintah yang bersifat ekstraktif karena menyerahkan pengelolaan sumberdaya alam kepada sektor privat dari pada mengutamakan shareholder di tingkat komunitas lokal. Sementara lingkungan kelembagaan ekonomi desa yang lebih inklusif malah tidak menjadi referensi model pengembangan ekonomi lokal.

**d. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian**

Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU R.I Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan dalam BAB I Pasal 1 nomor 8 yang isinya, Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya disebutkan pada nomor 12, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Hasil wawancara dengan warga desa Riam Durian yaitu Ibu Ida, yang mengatakan bahwa:

“Kami selalu menjalankan prosedur atau ketentuan yang ditetapkan oleh program, dimana aktivitas yang dilakukan dapat sepenuhnya mendukung proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan potensi pemberdayaan masyarakat secara maksimal

dengan tujuan akhir yaitu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat”

Adapun menurut Padly Papilaya yang mengatakan bahwa:

“Selaku masyarakat saya selalu berupaya untuk mengikuti segala bentuk prosedur yang telah ditetapkan sehingga aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat secara maksimal dilakukan”

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik, pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan. Ini menjadi penting karena objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan dinamikanya yang beragam. Fungsi pendampingan adalah untuk memfasilitasi, memotivasi masyarakat serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Pemberdayaan masyarakat *community-empowering* yang baik seyogyanya mampu mengakomodir berbagai aspek yang berkembang dan dibutuhkan masyarakat. Masyarakat memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan dan jati diri sebagai bagian dari sebuah komunitas. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain *community-development* merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut.

Program pemberdayaan yang baik juga mampu memunculkan berbagai potensi khas masyarakat dan mengembangkan dibantu oleh

sistem, alat, atau teknologi baru dan peran pendamping atau fasilitator yang akan mempercepat proses pemberdayaan sehingga bernilai tambah tinggi, serta proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu pembangunan keberlanjutan (*sustainable-development*) untuk jangka panjang. Pembangunan jangka panjang memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan di wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian termasuk faktor produksi, ekonomi, dan sosial budaya.

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengesalkan arti dari peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus faktor internal sangat penting sebagai salah satu bentuk *Self-Organizing* dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Salah satu faktor eksternal yang sangat penting adalah Pendamping atau fasilitator yang bersifat multidisiplin. Peran pendamping

pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif fasilitator pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran fasilitator akan dipenuhi oleh kader pendamping masyarakat dan lembaga-lembaga yang selama ini terus ditingkatkan oleh pelaku program pemberdayaan masyarakat.

Saat ini, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat desa mulai ditindak lanjuti serius, disah-kannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa. Melalui UU ini juga diadakan program Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain program dana desa, pemerintah juga mengadakan program Pendampingan Dana Desa dalam rangka implementasi pelaksanaan undang-undang desa. Pendamping Dana Desa bertugas sebagai fasilitator dan mendampingi pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa secara prosedur maupun teknis. Tenaga profesional pendamping dana desa terbagi menjadi tiga jenjang, Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli

(TA). Masing-masing jenjang memiliki tupoksi baik secara prosedur maupun secara teknis dalam mengimplementasikan tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT). Sesuai dengan panduan teknis tugas pokok tenaga pendamping profesional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa. Secara teknis tugas PLD dan PD adalah mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, kerja sama Desa, pembangunan BUM desa dan pembangunan yang bersekala lokal desa, melakukan fasilitasi, asistensi, konsultasi, dan advokasi masyarakat. Secara prosedural tugas PLD adalah mendampingi penyusunan rencana kerja dan laporan bulanan, menyimpan semua tanda bukti atau kwitansi bantuan biaya oprasional, dan bertanggung jawab atas realisasi pengadaan dan pemeliharaan inventaris oprasional pekerjaan.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan panduan teknis tugas pokok tenaga pendamping profesional ditingkatan Tenaga Ahli (TA) bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka: Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota terkait sosialisasi UU Desa. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Fasilitasi penegakan kewenangan desa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kapasitas masyarakat desa, kaderisasi masyarakat desa dalam rangka

pelaksanaan UU Desa , fasilitasi musyawarah desa, fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun regulasi di daerah yang berkaitan dengan pengaturan tentang desa, fasilitasi pengembangan pusat kemasyarakatan (*community center*) di desa dan/ atau antar desa, fasilitasi pengembangan ketahanan masyarakat desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan, dan fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendampingi desa melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Pada Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama)**

### **a. Faktor Pendukung**

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengatakan

bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan. Pengertian terpadu tidak berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas. Meskipun telaahan mengenai program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Kendala-kendala tersebut adalah:

a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar

Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan kurangnya memnadapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan. Kurangnya hubungan

dengan masyarakat luar dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak H. Rowandi, yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku kepala desa benar-benar mengetahui bagaimana karakteristik warga desa sini, dimana selama ini warga desa lebih bersifat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun demikian kondisi ini menjadikan masyarakat bersikap tertutup dengan kondisi diluar sehingga aktivitas yang dilakukan belum sepenuhnya melakukan hubungan antar masyarakat di desa”

Sedangkan menurut Eed memberikan tanggapan terkait dengan hubungan antara masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat maka upaya dalam peningkatan hubungan dengan masyarakat luar perlu ditingkatkan. Namun demikian kondisi ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini kondisi masyarakat yang lebih bersikap memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri. Kondisi ini terjadi karena masyarakat merasakan mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehingga aktivitas karyawan lebih bersifat tertutup.

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat

Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan

IPTEK pada suatu masyarakat, dimana menurut Bapak H. Rowandi yaitu sebagai berikut:

“Perkembangan ilmu pengetahuan juga berdampak pada upaya pengembangan desa sehingga potensi desa lebih dapat mendapatkan informasi terkait dengan berbagai upaya untuk peningkatan pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat”

Bapak Eed juga memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Adanya keterlambatan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan harapan”.

c. Sikap masyarakat yang tradisional

Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat. Tanggapan masyarakat terkait dengan sikap yang masih bersifat tradisional, dalam hal ini menurut Ibu Ida yaitu sebagai berikut:

“Kami sebagai masyarakat Desa Riam durian selalu berupaya mempertahankan kondisi tradisi yang ada di desa kami, sehingga tradisi yang kami pegang tidak hilang karena adanya perubahan jaman atau teknologi”

Sedangkan menurut Padly, yaitu sebagai berikut:

“Saya selaku penduduk asli disini selalu berupaya untuk mengembangkan potensi desa yang ada tanpa melakukan

perubahan-perubahan yang sifatnya dapat merusak kondisi desa sehingga tradisi yang ada selalu saya pertahankan”

d. Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing

Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Mereka tak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama masa penjajahan. Akibatnya, semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit mereka terima, hal ini dikemukakan oleh Ibu Ida:

“Kami selalu berupaya menyaring berbagai bentuk informasi dari luar sehingga hal-hal negatif yang terjadi dapat kami hindarkan, itu memang menjadi tekad kami”

Sedangkan menurut Bapak Pady Papilaya yaitu sebagai berikut:

“Upaya untuk menyaring berbagai informasi sangat kami butuhkan sehingga informasi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kami selaku masyarakat dan tidak merusak tradisi yang akan didesa”

e. Adat atau kebiasaan

Adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Unsur-unsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang dianut menjadi punah jika mereka menerima unsur-unsur baru bahkan dapat merusak

tatanan atau kelembagaan sosial yang mereka bangun dalam masyarakatnya.

f. Ketergantungan (*depedence*).

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

g. Rasa tidak percaya diri (*self distrust*)

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

h. Rasa tidak aman

Keberhasilan dan “masa-masa kejayaan” yang pernah dialami seseorang cenderung menyebabkan ia larut dalam “kenangan” terhadap keberhasilan tersebut dan tidak berani atau tidak mau melakukan perubahan. Contoh regresi ini adalah : seseorang yang tidak mau mengubah pola pertaniannya karena ia pernah mengalami masa-masa panen yang melimpah di waktu yang lalu. Rasa tidak aman berkaitan dengan keengganan seseorang untuk melakukan tindakan perubahan atau pembaharuan karena ia hidup dalam suatu kondisi yang dirasakan tidak membahayakan dan berlangsung dalam waktu cukup. Contoh rasa tidak aman ini antara lain : seseorang tidak berani mengemukakan

pendapatnya karena takut salah, takut malu dan takut dimarahi oleh pimpinan yang mungkin juga menimbulkan konsekuensi ia akan diberhentikan dari pekerjaannya.

i. Kesepakatan terhadap norma tertentu

Norma berkaitan erat dengan kebiasaan dalam suatu komunitas. Norma merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis namun mengikat anggota-anggota komunitas. Di satu sisi, norma dapat mendukung upaya perubahan tetapi di sisi lain norma dapat menjadi penghambat untuk melakukan pembaharuan.

j. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya

Perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain karena dalam suatu komunitas tidak berlaku hanya satu sistem tetapi berbagai sistem yang saling terkait, menyatu dan terpadu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan mantap. Sebagai contoh, perubahan sistem mata pencaharian dari ladang berpindah menjadi lahan pertanian tetap akan menimbulkan perubahan pada kebiasaan yang lain seperti pola pengasuhan anak, pola konsumsi dan sebagainya.

k. Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan dapat menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya pemberdayaan petani di suatu desa tidak dapat dilaksanakan karena ada kelompok kepentingan tertentu yang bermaksud membeli lahan pertanian untuk

mendirikan perusahaan tekstil. Kelompok kepentingan ini akan berupaya lebih dulu agar lahan pertanian tersebut jatuh ke tangan mereka.

l. Penolakan terhadap orang luar.

Anggota-anggota komunitas mempunyai sifat yang universal dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah rasa curiga dan “terganggu” terhadap orang asing. Pekerja sosial atau pendamping sosial yang akan memfasilitasi program pemberdayaan tentu akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas. Di samping itu, rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.

m. Kritik terhadap pemberian bantuan

Modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan dapat berupa rumah, gedung perkantoran, toko dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan telepon dan sebagainya. Modal fisik selalu terkait erat dengan modal manusia. Modal fisik tidak dapat digunakan apabila tidak ada modal manusia yang menggerakkan atau memanfaatkan atau melaksanakan kegiatan di dalamnya. Oleh karena itu, modal fisik sering disebut sebagai pintu masuk (*entry point*) untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa penjelasan mengenai kendala dalam program pemberdayaan, perlu dicermati bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu program pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala yang timbul. Ada faktor-faktor kendala yang relatif mudah untuk diatasi namun ada beberapa faktor yang cukup sulit untuk diubah, misalnya faktor kendala yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai contoh, upacara perkawinan atau kematian yang memerlukan biaya besar untuk penyelenggaraannya tidak bisa dengan mudah dikurangi dari adat istiadat komunitas karena upacara tersebut dianggap sebagai ritual yang sakral dan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, cara yang paling tepat adalah dengan melakukan pengkajian awal atau studi kelayakan terhadap komunitas.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dibahas di atas dapat diketahui beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat keberhasilan dari pola kemitraan inti plasma. Faktor-faktor penghambat tersebut yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) aspek yakni faktor yang bersifat internal atau bersumber dari dalam organisasi sendiri dan faktor eksternal atau bersumber dari luar kemitraan.

### ***1) Faktor Internal***

Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor penghambat terhadap pengembangan organisasi pemerintah karena SDM-nya kurang terampil seperti halnya penjelasan mengenai aspek

sumber daya manusia. Sebagaimana terlihat sumber daya manusia atau aparat yang bertugas pada koperasi Kompak Maju Bersama tersebut secara kuantitas atau jumlah sumber daya yang dimiliki terkait dengan program-program kemitraan yang dilakukan.

## 2) *Faktor Eksternal*

Aspek yang bersifat eksternal dalam hal ini adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi meliputi:

### a. Partisipasi masyarakat mentaati aturan dalam organisasi

Efektifnya aturan dalam badan pengelolaan organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk memperoleh atau melaksanakan pembangunan. Namun hal tersebut yang kurang terlihat adalah masyarakat di kawasan, masih rendah partisipasinya dalam memperoleh tujuan organisasi. Sehingga hal ini kadangkala terjadi setelah mendapat teguran dari aparat, hal itu bukan karena masyarakat tidak mau mengurus organisasi atau sengaja melanggar tetapi lebih banyak mereka tidak tahu mengenai pengelolaan organisasi. Hal itu tidak lain karena sosialisasi aturan ini bagi masyarakat tersebut masih kurang.

### b. Hubungan antar status

Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi. Sebaliknya

seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah. Susunan status dalam satu kelompok dalam organisasi selalu tampil dalam 2 wujud yaitu berupa status formal dan status sosial. Status formal adalah berkaitan dengan jenjang atau hierarki yang ada dalam kelompok atau organisasi yang berkaitan langsung dengan rantai komando. Status sosial tidak selalu berkaitan dengan status formal seseorang, walaupun dapat saja seseorang yang mempunyai status formal yang tinggi dapat pula mempunyai status sosial yang tinggi.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit**

##### **a. Bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit**

Bentuk pemberdayaan pola kemitraan inti plasma, kondisi ini dikarenakan kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Upaya ini dilakukan untuk memberikan dukungan terkait dengan upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan dengan

adanya program perdayaan terkait dengan aktivitas operasional dalam pemberdayaan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Menurut Tjokowinoto dalam Christie S (2005: 16) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya ; “Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta

mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas

Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

b. Aktivitas pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma.

Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berbeda di dalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengelolaan sumberdaya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa mempelopori pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan keseimbangan alam dapat terlestarikan, semata orientasi kesejahteraan rakyat tercapai secara berjangka panjang. Cara desa dalam menjaga aset ekonomi ini berbalikan dengan model pemerintah yang bersifat ekstraktif

karena menyerahkan pengelolaan sumberdaya alam kepada sektor privat dari pada mengutamakan shareholder di tingkat komunitas lokal. Sementara lingkungan kelembagaan ekonomi desa yang lebih inklusif malah tidak menjadi referensi model pengembangan ekonomi lokal.

Sehubungan dengan pengertian ini, Sumodiningrat (1997) mengartikan keberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat dengan keberdayaan yang tinggi, adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, dan memiliki nilai-nilai intrinsik yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti sifat-sifat kekeluargaan, kegotongroyongan, dan (khusus bagi bangsa Indonesia) adalah keragaman atau kebhinekaan.

Keberdayaan masyarakat, adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus menerus) meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi,

bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya

c. Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik, pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan. Ini menjadi penting karena objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan dinamikanya yang beragam. Fungsi pendampingan adalah untuk memfasilitasi, memotivasi masyarakat serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Pemberdayaan masyarakat *community-empowering* yang baik seyogyanya mampu mengakomodir berbagai aspek yang berkembang dan dibutuhkan masyarakat. Masyarakat memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agardalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan dan jati diri sebagai bagian dari sebuah komunitas. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain *community-development* merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut.

- d. Hasil pemberdayaan masyarakat desa riam durian melalui pola kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit.

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengesalkan arti dari peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus faktor internal sangat penting sebagai salah satu bentuk *Self-Organizing* dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Salah satu faktor eksternal yang sangat penting adalah Pendamping atau fasilitator yang bersifat multi disiplin. Peran pendamping pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif fasilitator pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran fasilitator akan dipenuhi oleh kader pendamping masyarakat dan lembaga-lembaga yang selama ini terus ditingkatkan oleh pelaku program pemberdayaan masyarakat.

Saat ini, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat desa mulai ditindak lanjuti serius, disah-kannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa. Melalui UU ini juga diadakan program Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain program dana desa, pemerintah juga mengadakan program Pendampingan Dana Desa dalam rangka implementasi pelaksanaan undang-undang desa. Pendamping Dana Desa bertugas sebagai fasilitator dan mendampingi pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa secara prosedur maupun teknis. Tenaga profesional pendamping dana desa terbagi menjadi tiga jenjang, Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli (TA). Masing-masing jenjang memiliki tupoksi baik secara prosedur maupun secara teknis dalam mengimplementasikan tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT). Sesuai dengan panduan teknis tugas pokok tenaga pendamping profesional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa. Secara teknis tugas PLD dan PD adalah mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, kerja sama Desa, pembangunan BUM desa dan pembangunan yang bersekala lokal desa, melakukan fasilitasi, asistensi, konsultasi, dan advokasi masyarakat. Secara prosedural tugas PLD adalah mendampingi penyusunan rencana kerja dan laporan bulanan, menyimpan semua tanda bukti atau kwitansi bantuan biaya operasional, dan bertanggung jawab atas realisasi pengadaan dan pemeliharaan inventaris operasional pekerjaan. Hasil proses pemberdayaan tersebut memiliki dukungan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan tersebut dapat ditunjukkan dari data yang diperoleh terkait dengan jumlah keuntungan yang diterima masyarakat

setelah mendapatkan bantuan modal dari PT. Bumi Guna Jaya Abadi, dan jumlah keuntungan yang diterima oleh petani. Data tersebut secara lengkap dapat disajikan pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Keuntungan Petani bantuan modal dari**  
**PT. Bumi Guna Jaya Abadi Tahun 2017**

Kelompok	Jumlah Modal	Perubahan	Peningkatan
1	750.000.000	862.500.000	112.500.000
2.	750.000.000	870.040.000	120.040.000
3	750.000.000	887.500.000	137.500.000

Sumber: Koperasi Kompak Maju Bersama, Tahun 2017

Pemberdayaan mempunyai daya tarik, selalu ada pencarian akan gagasan-gagasan dan konsep baru dari pemberdayaan lebih baru, lebih segar dari pada banyak teori peningkatan dan motivasi kerja yang sudah usang. "Organisasi seperti *total quality, habitual improvement, self-sirected team work, internal costumer, competence management* dan sebagainya. Banyak perilaku faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan terkandung dalam nilai-nilai, perilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi perubahan-perubahan harus dilakukan pada tingkat yang berada diluar pengaruh individu. Mereka tidak mungkin terjadi tanpa perencanaan dan pelepasan yang menyeluruh dari kekuatan oleh manager senior organisasi.

## **2. Faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit**

### **a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar**

Adanya kehidupan masyarakat yang tertutup, hingga menyebabkan setiap warganya sulit untuk melakukan kontak atau hubungan dengan

masyarakat lain, menyebabkan warga masyarakat tersebut terasing dari dunia luar. Akibatnya, bahwa masyarakat tersebut tidak dapat mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain di luarnya. Jika hal tersebut tetap berlangsung, atau bahkan tidak sepanjang masa maka akan menyebabkan kemunduran bagi masyarakat yang bersangkutan, sebab mereka tidak memperoleh masukan-masukan misalnya saja pengalaman dari kebudayaan lain, yang dapat memperkaya bagi kebudayaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, faktor ketertutupan atau kurangnya hubungan dengan masyarakat atau kebudayaan lain, menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat atau menghalangi bagi proses perubahan sosial dan budaya di dalam masyarakat.

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat

Kemajuan teknologi informasi telah banyak membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui cara yang tepat dalam menyikapi kemajuan teknologi informasi tersebut untuk menghindarkan pengaruh dari hal-hal yang negatif yang turut dibawa oleh kemajuan teknologi informasi. Sikap yang sebaiknya kita tunjukkan/lakukan terhadap kemajuan teknologi informasi ialah mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi informasi, mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki dan menghargai privasi milik orang lain, menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku dan hukum agama kita, merubah

cara pandang kita supaya peduli akan kemajuan teknologi informasi dan dampak yang ditimbulkannya. Dengan demikian dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi akan dapat ditekan secara maksimal.

Akan tetapi sangat sulit bagi para remaja ataupun anak-anak untuk bersikap seperti itu, maka untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dalam memasuki era globalisasi (kemajuan IPTEK) diperlukan pendidikan yang tepat. Salah satu komponen pendidikan yang perlu dikembangkan adalah kurikulum yang berbasis pendidikan teknologi di jenjang pendidikan dasar. Bahan kajian ini merupakan materi pembelajaran yang mengacu pada bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di mana peserta didik diberi kesempatan untuk membahas masalah teknologi dan kemasyarakatan, tata cara menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memahami teknologi dan lingkungan.

c. Sikap masyarakat yang tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang kehidupannya masih banyak di kuasai oleh adat istiadat. adat istiadat merupakan suatu aturan yang kokoh yang mencakup segala sistem budaya yang mengatur segala tindakan atau perbuatan masyarakat dalam kehidupan sosialnya maupun secara pribadi. jadi kehidupan masyarakat tradisional berdasarkan adat atau kebiasaan-kebiasaan yang di wariskan oleh para leluhur mereka atau nenek moyangnya. serta kehidupan mereka tidak terlalu di pengaruhi oleh kebiasaan-kebiasa dari luar lingkungan mereka atau lingkungan

sosial.kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil dari interaksi terhadap lingkungan alam sosial tanpa menerima pengaruh dari luar. jadi kebudayaan masyarakat tradisional tidak mengalami perubahan mendasar baik itu dari dalam maupun dari luar. karena adat istiadat berperanan sangat kuat sehingga menguasai kehidupan mereka.secara geografis masyarakat berada di perdalam yang jauh dari keramaian kota. Masyarakat tradisional dapat juga di sebut sebagai masyarakat pedesaan atau masyarakat desa. masyarakat desa sekelompok orang yang hidup bersama, saling bekerja sama (gotong royong) dan berhungan sangat erat dan tahan lama,satu dengan yang lain saling mengenal karena sistemnya bersifat kekerabatan.

d. Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing

Manusia tidak pernah lepas dari hubungan dengan manusia atau masyarakat lain dalam suatu pergaulan. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain mengakibatkan suatu masyarakat menjadi terasing dari pergaulan hidup dengan masyarakat lainnya. Akibatnya mereka tidak mengetahui kemajuan atau perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Apabila pergaulan saja sangat terbatas, maka yang terjadi adalah keterbatasan pemikiran sehingga keinginan untuk berubahpun juga sangat minim.

e. Adat atau kebiasaan

Nilai-nilai tradisional akan memunculkan sebuah kepentingankepentingan kolektif yang tertanam kuat dalam diri masyarakat. Hal ini juga akan

menghambat sebuah perubahan sosial karena pada dasarnya suatu perubahan itu berusaha untuk meninggalkan nilai-nilai lama guna menuju pada nilai-nilai yang baru yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masyarakat saat sekarang. Oleh karena itu, seseorang yang menginginkan sebuah perubahan harus berani membuang jauh nilai-nilai kepentingan semacam ini.

f. Ketergantungan (*depedence*).

Teori ketergantungan dari John A Hobson. menjelaskan imperialisme dan kolonialisme melalui motivasi keuntungan ekonomi. Teori ini merupakan kelompok teori Gold, yang menjelaskan, bahwa terjadinya imperialisme karena adanya dorongan untuk mencari pasar dan investasi yang lebih menguntungkan. Ketika pasar dalam negeri telah jenuh atau pasar dalam negeri terbatas, maka mereka mencari pasar baru di Negara – negara lain. Menurut Vladimir Ilich Lenin, imperialisme merupakan puncak kapitalisme. Kapitalisme yang semula berkembang dari kompetisi pasar bebas, mematikan perusahaan – perusahaan lain dan memunculkan kapitalisme yang menguasai pasar. Walaupun bentuknya pada jaman sekarang ini tidak menggunakan armada militer, namun dampaknya tetap saja merugikan negara yang menjadi objek penanaman investasi mereka. Teori ketergantungan pada dasarnya menyetujui, bahwa yang menjadi penyebab ketergantungan adalah kekurangan modal dan kurangnya tenaga ahli. Tetapi faktor penyebabnya adalah proses imperialisme dan neo imperialisme yang menyedot surplus modal yang terjadi di negara

pinggiran ke negara pusat. Akibat pengalihan surplus ini, negara pinggiran kehilangan surplus utama yang dibutuhkan untuk membangun negerinya. Maka, pembangunan dan keterbelakangan merupakan dua aspek dari sebuah proses global yang sama. Proses global ini merupakan proses kapitalisme dunia. Di kawasan yang satu, proses itu melahirkan pembangunan, di kawasan yang lain, menyebabkan lahirnya keterbelakangan.

g. Rasa tidak percaya diri (*self distrust*)

Kepercayaan diri yang berlebihan (*over confidence*) akan menyebabkan seseorang dapat bertindak kurang memperhatikan lingkungan dan cenderung menghancurkan norma dan etika standar yang berlaku, serta memandang sepele orang lain. Selain itu, individu yang memiliki *over confidence* sering memiliki sikap dan pemikiran yang *over estimate* terhadap sesuatu. Kepercayaan diri yang kurang dapat menyebabkan seseorang cenderung bertindak ragu-ragu, rasa rendah diri dan tidak memiliki keberanian. Kepercayaan diri yang berlebihan maupun yang kurang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi dirinya namun juga bagi lingkungan sosialnya.

h. Rasa tidak aman

Rasa tidak aman ini muncul karena kita membandingkan diri dengan orang lain, kita berkaca dan ternyata menemukan diri sendiri yang belum banyak berkembang, kita harus mulai bertindak, mencapai lebih banyak lagi,

mewujudkan lebih maju daripada kita, dan kita jadi sadar untuk juga memajukan diri sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit dapat ditunjukkan dari bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit dapat ditunjukkan adanya pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dan upaya ini dilakukan untuk memberikan dukungan terkait dengan upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Mengenai aktivitas pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma yaitu adanya upaya memberdayakan masyarakat yang dilakukab secara terus menerus untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat sehingga mendukung untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Riam Durian Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit yaitu dengan adanya aktivitas adanya proses pendampingan sehingga aktivitas masyarakat dapat diarahkan sesuai dengan tingkat kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Hasil pemberdayaan masyarakat desa riam durian melalui pola kemitraan

inti plasma perkebunan kelapa sawit yaitu menunjukkan adanya keberhasilan dalam proses pendampingan atau fasilitator yang bersifat multi disiplin. Peran pendamping pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Kondisi ini menjadi salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan aktivitas pemberdayaan.

2. Hasil analisis dapat diketahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma, perkebunan kelapa sawit, dimana kurangnya hubungan dengan masyarakat luar menyebabkan setiap warganya sulit untuk melakukan kontak atau hubungan dengan masyarakat lain, menyebabkan warga masyarakat tidak mendapatkan informasi secara lengkap terkait dengan aktivitas pemberdayaan yang dilakukan. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat menjadikan teknologi informasi belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Selanjutnya mengenai sikap masyarakat yang tradisional sehingga menjadikan adat istiadat dijadikan sebagai dasar dalam tindakan atau perbuatan masyarakat dalam kehidupan sosialnya maupun secara pribadi. Mengenai prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing akan memberikan dampak terhadap keterbukaan masyarakat dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi dan sikap ketergantungan (*dependence*) menjadikan aktifitas pemberdayaan belum sepenuhnya mendukung

aktivitas pemberdayaan yang dilakukan. Apabila dikaitkan dengan rasa tidak percaya diri (*self distrust*) menyebabkan masyarakat dapat bertindak kurang memperhatikan lingkungan dan cenderung menghancurkan norma dan etika standar yang berlaku, serta memandang sepele orang lain.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka perusahaan disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sehingga dapat mendukung kesiapan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan implementasi proses pemberdayaan yang dilakukan mulai dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program sehingga program pemberdayaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dan kelompok peduli dalam implementasi program pemberdayaan ini karena masyarakat miskin termasuk masyarakat yang memiliki kelemahan dalam segala hal, karena pendidikan, ekonomi dan status sosialnya, misalnya melakukan program pendampingan perlu dilakukan untuk memaksimalkan proses pemberdayaan yang dilakukan.

3. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat maka diperlukan adanya transparansi anggaran (dana) dalam pengelolaan program ini sehingga tujuan utama penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif dan program-program yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, 1996,“ Pemberdayaan (*Empowerment*)”, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, hal.44-46
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Badrun,M. (2010). "Konsepsi pola PIR". *Tonggak Perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. p.
- Batinggi, Ahmad. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1987, *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Surakarta: Pustaka Cakra
- Friedmann, John, 1981. “Kemiskinan Urban di Amerika Latin”, dalam Andre Bayo Ala (ed)., *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberti, Yogyakarta, hlm 124-146
- Ginanjart Kartasasmita, 1997, *Kemiskinan*, Jakarta: Balai Pustaka
- Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Harry Hikmat, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: HUP
- Hakim, EM Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta. AR Ruzz Media
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika
- Indrasari Tjandraningsih. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Nuansa
- Jamasy, O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Blantika

- Kountur, Ronny, 2004, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan. Tesis*, Jakarta:Penerbit PPM
- Moch.Nazir. (2003), *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014.*Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications.
- Nawawi, Hadari. 1983. *Metode Penelitian Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Rivai, Vethzal & Basri. 2005. *Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa, Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandun
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjo. 1999. ”Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani: Kasus di Propinsi Jawa Barat”. Disertasi Doktor. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- Usman Sunyoto. 2004. *“Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- The Liang Gie, 1983, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Waldo, Dwight.2009, *Pengantar Sudi Public Administrasi*, Terjemahan Drs.Slame ,W. Atmosudarmo. Jakarta: Penerbit Jayasakti,



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 17072 / UN.10.3/PG/2015  
 Lampiran : -  
 Hal : Pra Riset/Survey  
 Kepada : Yth. PT. BGA ( Bumitama Gnajaya Agro )  
 Di Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Pra Riset/Survey bagi mahasiswa :

Nama : Ardiyanto  
 Alamat : tata kroja RT/RW.02, Riam durian kec. Kotawaringin lama  
 NIM : 115030507111002  
 Jurusan : Administrasi Publik  
 Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan  
 Tema : pemberdayaan masyarakat desa riam durian melalui pola kemitraan inti plasma, perkebunan kelapa sawit. ( studi desa riam durian, kecamatan kotawaringin lama )  
 Lamanya : 3 (tiga) Minggu ( 1 desember 2015 – 1 januari 2016)  
 Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 26 November 2015

Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

**Dr. Chohidul Saleh, M.Si**  
 NIP. 19600112 198701 1 001

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.
2. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian
3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi pemberdayaan
4. Jaminan atas keberhasilan dalam fungsi pemberdayaan
5. Pengukuran dari keberhasilan fungsi pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.
6. Anggaran atau target dalam upaya peningkatan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.
7. Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma Desa Riam Durian
8. Bentuk dukungan dalam upaya pelaksanaan pola kemitraan.
9. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian
10. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.
11. Pengukuran atas keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma?
12. Apakah sistem yang diterapkan benar-benar mampu memberikan dukungan terkait dengan proses pola kemitraan?
13. Aktivitas yang dilakukan pada Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian?
14. Proses apa yang harus dilakukan agar pola kemitraan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan.
15. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat Melalui Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian.
  - Faktor Pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat.
    1. SDM
    2. Sistem dan prosedur yang ditetapkan
  - Faktor Penghambat yang terkait dengan proses pemberdayaan.
    1. SDM
    2. Sistem dan prosedur yang ditetapkan

## **DATA DOKUMENTASI**

1. Gambaran umum Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit  
Desa Riam Durian
2. Struktur dan Tugas masing-masing bagian Pola Kemitraan Inti Plasma,  
Perkebunan Kelapa Sawit Desa Riam Durian
3. Fungsi, tujuan dan tugas Pola Kemitraan Inti Plasma, Perkebunan Kelapa  
Sawit Desa Riam Durian
4. Aktivitas operasional
5. Wilayah kerja

Lampiran 1: Peta Lahan Plasma

